

JELANG PILKADA, POLDA RIAU BERSAMA MENDAGRI DAN PEMPROV RAPAT PENGENDALIAN INFLASI



Sumber gambar: https://mediacenter.riau.go.id/foto_berita/medium/jelang-pilkada-polda-riau-mendag.jpg

Pemerintah Provinsi Riau menyelenggarakan Rapat Koordinasi dalam rangka pembahasan langkah kongkret pengendalian inflasi di daerah tahun 2024 dan sosialisasi kebijakan penyediaan 3 juta rumah. Acara digelar di melalui Riau Command Center, Gedung Menara Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau, Senin (25/11).

Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) secara virtual dan dihadiri oleh berbagai instansi terkait di wilayah Riau. Rapat dilakukan menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara berbagai lembaga guna menanggulangi inflasi serta mendukung program penyediaan rumah untuk masyarakat.

Rapat dimulai pukul 08.00 WIB tersebut mengundang sejumlah pejabat, antara lain Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Provinsi Riau Onki Hercawan. Lalu, ada pula perwakilan Ditreskrimsus Polda Riau Iptu Herry Yusman, serta beberapa perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Riau, Bulog, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau.

"Rapat itu membahas sejumlah isu strategis yang mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial di Provinsi Riau," ujar Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Nasriadi.

Satu di antara poin penting yang dibahas dalam rapat adalah tingginya laju inflasi di sejumlah daerah, dengan fokus pada kenaikan Indeks Harga Perdagangan (IPH).

Kenaikan IPH tertinggi terjadi di Kabupaten Buton Utara dengan angka perubahan mencapai 4,06%, sementara di Pulau Sumatera, Kabupaten Kaur mencatatkan kenaikan IPH sebesar 2,26%.

Beberapa komoditas yang berperan dalam kenaikan IPH tersebut, terutama daging ayam ras dan bawang merah, menjadi perhatian khusus dalam diskusi tersebut.

Selain itu, rapat juga membahas fluktuasi harga sejumlah bahan pokok di pasar. Harga bawang merah mengalami kenaikan signifikan pada akhir November 2024, dengan kenaikan mencapai 18,23% dibandingkan bulan Oktober.

Hal ini menjadi masalah yang mempengaruhi daya beli masyarakat, dan dibutuhkan langkah kongkret untuk menstabilkan harga komoditas ini di pasar.

Harga beras dan minyak goreng juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Meskipun harga beras tercatat sedikit menurun sebesar 0,18% dibandingkan Oktober 2024, namun jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras pada M3 November 2024 bertambah.

Sementara itu, harga minyak goreng tercatat naik 1,26%, dan peningkatan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga minyak goreng pun menjadi sorotan dalam pembahasan pengendalian inflasi.

"Sosialisasi mengenai kebijakan penyediaan 3 juta rumah juga menjadi bagian penting dalam rapat tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," jelas Nasriadi.

Diharapkan melalui kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, serta sektor swasta, penyediaan rumah dapat terwujud sesuai dengan target yang telah ditentukan. Untuk mencapainya, berbagai pihak yang hadir dalam rapat juga diingatkan untuk terus berkoordinasi dan mengimplementasikan langkah-langkah nyata untuk menanggulangi inflasi dan mendukung program perumahan nasional.

"Kerja sama antarinstansi sangat dibutuhkan untuk memastikan distribusi bahan pokok yang stabil dan program perumahan berjalan lancar," katanya.

Rapat ini ditutup dengan harapan agar berbagai kebijakan yang disusun dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan, serta memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat, khususnya di Provinsi Riau.

Pemerintah Provinsi Riau bersama pihak terkait berkomitmen untuk terus memantau perkembangan inflasi dan memastikan ketersediaan rumah untuk masyarakat sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

Sumber berita:

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/88997/jelang-pilkada-polda-riau-mendagri-dan-pempro.html>, “Jelang Pilkada, Polda Riau Bersama Mendagri dan Pemprov Rapat Pengendalian Inflasi”, 25 November 2024; dan
2. <https://klikmx.com/baca/27733/polda-riau-mendagri-dan-pemprov-gelar-rapat-pengendalian-inflasi-jelang-pilkada-.html>, “Polda Riau, Mendagri, dan Pemprov Gelar Rapat Pengendalian Inflasi, Jelang Pilkada”, 25 November 2024.

Catatan:

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Di Indonesia perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024, Sasaran Inflasi adalah suatu tingkat inflasi yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu. Inflasi Indeks Harga Konsumen (*headline inflation*) yang selanjutnya disebut Inflasi IHK adalah kenaikan IHK dari waktu ke waktu tertentu yang dihitung dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.

Jenis Sasaran Inflasi yang ditetapkan dan diumumkan merupakan Inflasi IHK tahunan (*year-on-year*) di akhir tahun, untuk bentuk sasaran inflasi yang ditetapkan merupakan titik dengan toleransi (*point with deviation*) dengan tingkat dan periode Sasaran Inflasi IHK ditetapkan sebagai berikut:

- a. 3,0% (tiga persen) untuk tahun 2022;
- b. 3,0% (tiga persen) untuk tahun 2023; dan
- c. 2,5% (dua koma lima persen) untuk tahun 2024, dengan deviasi sebesar 1,0% (satu persen).

Pengukuran IHK

IHK adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Berdasarkan *the Classification of Individual Consumption by Purpose* (COICOP) 2018, IHK dikelompokkan ke dalam 11 (sebelas) kelompok pengeluaran, yaitu

1. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau;

2. Kelompok pakaian dan alas kaki;
3. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga;
4. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga;
5. Kelompok kesehatan;
6. Kelompok transportasi;
7. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan;
8. Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya;
9. Kelompok pendidikan;
10. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dan
11. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Mengutip Berita Resmi Statistik No.23/04/Th.XXVII, tanggal 1 April 2024 Pada Maret 2024 terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 3,05 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,13. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,43 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,89 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,55 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,03 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,17 persen; kelompok transportasi sebesar 0,99 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,62 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,70 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,51 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,56 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,13 persen. Tingkat inflasi month-to-month (m-to-m) Maret 2024 sebesar 0,52 persen dan tingkat inflasi year-to-date (y-to-d) Maret 2024 sebesar 0,93 persen. Tingkat inflasi y-on-y komponen inti Maret 2024 sebesar 1,77 persen; inflasi m-to-m sebesar 0,23 persen; dan inflasi y-to-d sebesar 0,57 persen.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau